

PERAN INTEGRATIF AGAMA-AGAMA DALAM MENGATASI MASALAH KEMISKINAN DI BANJARASRI KALIBAWANG KULONPROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN PENDEKATAN SOSIOLOGI DAN PSIKOLOGI

Dian Nur Anna*

Abstract

This study aims to determine the poverty problems of Banjarasri society in Kalibawang, Kulonprogo, the Special Territory of Yogyakarta in sociology and psychological perspective. The study tries to map out the main problems of the poverty and to look for alternatives solution of the problem. Implementing grounded research and integrative review on the role of religions in society, the study proves that religions are even able to help in solving the problem of poverty. The study then concluded that religious institutions have important roles in overcoming poverty problem through various economic, social and educational programs.

Keywords: Peran Agama, Kemiskinan

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern ini, agama dengan norma-norma yang mengikatnya, telah mendapatkan tantangan besar untuk menghadapi persoalan kemanusiaan. Agama dihadapkan pada tuntutan untuk memecahkan secara konkrit persoalan-persoalan kemanusiaan yang semakin lama semakin banyak. Dalam merespon masalah-masalah yang ada tersebut, seringkali agama dengan dibatasi oleh sistem dan norma-normanya sendiri telah merespon masalah yang ada dalam masyarakat.

Ada pro dan kontra terhadap peran agama untuk memecahkan problem kemanusiaan. Ini berhubungan dengan peran agama yang dulunya menjadi

sumber inspirasi bagi pemecahan masalah-masalah, akhirnya agama itu sendiri menjadi masalah. Hal ini menimbulkan adanya ketidakpercayaan terhadap agama. Adanya anggapan pesimis bahwa agama tidak bisa memecahkan masalah, sehingga timbul pendapat yang mengatakan bahwa agama sebagai candu masyarakat.¹ Ini didasarkan oleh keterlibatan agama baik secara langsung atau tidak dalam berbagai peperangan dan penindasan di berbagai belahan dunia.

Meskipun demikian, ada kelompok yang mengatakan bahwa agama dapat memecahkan problem yang ada dalam masyarakat. Pendapat ini dapat merujuk kepada dimensi kedalaman atau dimensi etik dari agama. Dimensi etik ini dapat memberikan kepuasan batin manusia. Sudjatmoko mengatakan bahwa agama dapat memecahkan problem masyarakat modern. Agama dapat memecahkan problem keterbelakangan ekonomi, kemiskinan, dilema moral dan etika.² Abdullahi Ahmed an-Na'im juga menegaskan bahwa satu-satunya alternatif yang dapat mengeluarkan manusia dari dilema adalah agama yang menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.³ Salah satu masalah yang dihadapi adalah masalah kemiskinan.

Perekonomian di masyarakat Kulonprogo mengalami penurunan dan masyarakat khususnya di Banjarasri Kalibawang tidak bisa membeli kebutuhan pokok yang harganya semakin melambung. Hal ini mempengaruhi kehidupan masyarakat secara psikologis. Di daerah tersebut, masyarakat mencukupi kebutuhan dengan bertani, berdagang dan lain-lain. Untuk melakukan aktivitasnya, mereka harus melewati pegunungan. Karena jalan yang mendaki, banyak penduduk membawa dagangannya dengan berjalan kaki. Mereka menjual dagangannya ke pasar dan bersaing dengan pedagang yang datang dari luar daerah.

Hal ini ditambah dengan terjadinya tanah longsor yang mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian. Kondisi seperti itu ternyata mampu

¹ Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Karl Mark. F. Nietzsche mengungkap juga tentang Tuhan telah mati, dan A.N. Wilson mengatakan bahwa agama sebagai biang kerok keonaran di muka bumi. Nurcholis Madjid, "Beberapa Renungan Tentang Kehidupan Keagamaan di Indonesia Untuk Generasi Mendatang", *Makalah* di TIM, 21 Oktober 1992, 3; Ahmad Suaedy, "Agama, Spiritualitas Baru dan Keadilan Perspektif Islam", dalam YB Mangunwijoyo dkk., *Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat* (Yogyakarta: Penerbit Institut Dian/Intefidei, 1994), 155.

² Sudjatmoko, *Etika Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 1984), 181.

³ An Na'im mengungkapkan bahwa sekularisasi bukan merupakan jalan keluar bagi dilema kemanusiaan modern. Abdullahi an-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and international Law* (Syracus: Syracus University Press, 1990), 10.

meninggalkan jejak yang mendalam pada setiap orang yang mengalaminya secara langsung maupun pada kita yang hanya mampu menyaksikan sejumlah bencana yang terjadi lewat tayangan berbagai media. Di saat yang sama, persoalan kemiskinan semakin meluas. Ini ditandai dengan membengkaknya jumlah penganggur setiap tahun. Di tengah kondisi yang kurang menentu seperti itulah, krisis multidimensi yang terjadi pada bangsa ini belum terlihat kemajuannya secara signifikan. Utang luar negeri kita semakin hari juga ternyata semakin menggunung.

Dengan demikian, masyarakat masih hidup dalam kemiskinan. Hal ini mempengaruhi kehidupan psikologis masyarakat. Untuk memberikan penyegaran pada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mengadakan acara peringatan Hari Jadi Kulonprogo yang ke-58 yang melibatkan 58 orang pemuka agama. Ada 58 orang tersebut terdiri dari 35 orang pemuka Agama Islam, 8 pemuka Agama Katolik, 5 pemuka Agama Kristen, 5 pemuka Agama Buddha dan 5 pemuka agama Hindu mengadakan doa bersama yang merupakan salah satu rangkaian dari peringatan Hari Jadi Kabupaten Kulonprogo tersebut. Menurut H. Toyo Santoso Dipo, Bupati Kulonprogo⁴, doa bersama tersebut akan memberikan kesejukan pada masyarakat di Kulonprogo. Meskipun setiap agama melakukan doa bersama, namun tempat perayaan dilakukan di tempat yang terpisah. Pemuka Agama Islam melakukan doa di Mushola Al Istiqomah Pemkab, Pemuka Katolik di ruang Wakil Bupati, Pemuka Kristen di ruang Assek II, Pemuka Buddha di ruang Sekda dan Hindhu di ruang Assek I.⁵

Berdasarkan hal tersebut, agama-agama tersebut belum sepenuhnya menyatu dan masih ada klaim kebenaran dari masing-masing agama. Jika setiap agama menganggap agama mereka sendiri yang benar dan yang lain salah maka akan memunculkan konflik antar agama.⁶ Melihat realitas tersebut, agama di samping menampakkan sisi integratif (pemersatu), juga dan disintegratif (memecah-belah). Kedua faktor tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Jika keduanya tidak bisa diatur dengan baik, maka agama benar-benar telah mengalami krisis.⁷

⁴ Mediacenter, "58 Pemuka Agama Panjatkan Doa Untuk Kemakmuran Kulon Progo", Selasa, 13/10/2009 09:16 WIB, e-mail : admin@kulonprogokab.go.id, 1.

⁵ Mediacenter, "58 Pemuka Agama Panjatkan, 1.

⁶ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Rosda Karya, 2001), 174.

⁷ Huston Smith, *Agama-agama Manusia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), i.

Untuk mengatasi krisis yang demikian, dialog antar agama sebagai salah satu sisi integratif agama perlu dilakukan. Dengan demikian, semua agama dapat berperan aktif secara bersama-sama untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya di Kulonprogo.

2. Rumusan Masalah

Penelitian ini untuk mengungkap tentang bagaimana problem kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat di Banjarasri Kalibawang Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagaimana peran agama-agama untuk mengatasi kemiskinan di Banjarasri Kalibawang Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Tujuan Kegunaan Penelitian

Dengan mengetahui problem kemiskinan yang dihadapi masyarakat khususnya di Banjarasri Kalibawang Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta, peneliti ingin memetakan problem utama dan mencari solusi alternatif terhadap problem tersebut. Dengan mengetahui peran integratif agama-agama untuk mengatasi kemiskinan di Banjarasri Kalibawang Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta, peneliti ini membuktikan bahwa agama-agama dapat membantu memecahkan masalah kemiskinan yang dihadapi masyarakat dan bukan sebagai sumber masalah ditinjau dari aspek sosiologi maupun psikologi.

4. Kerangka Teoritis

Dari fenomena di atas, perlu melihat peran agama dalam masyarakat. Peran tersebut sangat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pemeliharaannya.⁸ Secara sosiologis, pengaruh agama bisa dilihat dari dua sisi, yaitu pengaruh yang bersifat positif atau pengaruh yang menyatukan (*integrative factor*) dan pengaruh yang bersifat negatif atau pengaruh yang bersifat destruktif dan memecah-belah (*desintegrative factor*).⁹ Pembahasan tentang fungsi agama di sini akan dibatasi pada dua hal yaitu agama sebagai faktor integratif dan sekaligus disintegratif bagi masyarakat. Penelitian ini memfokuskan pada peran integratif agama melalui

⁸ Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat*, terj. Abdul Muis Naharong (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 34.

⁹ Joachim Wach, *Sociology of Religion* (Chicago: The Chicago University Press, 1971), 35.

para pemeluknya dalam membantu memecahkan masalah Hal ini akan mempengaruhi psikologi(no. footnote menyesuaikan: Menurut Zakiyah Darajat, Psikologi Agama adalah meneliti kehidupan beragama seseorang dengan mempelajari seberapa besar pengaruh keyakinan Agama pada seseorang dan mempelajari berapa besar pengaruh keyakinan Agama itu dalam sikap dan tingkah laku serta keadaan hidup pada umumnya, mempelajari pertumbuhan dan perkembangan jiwa Agama pada seseorang dan faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan serta meneliti pengaruh Agama terhadap sikap dan tingkah laku orang atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang. Zakiyah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: P.T.Bulan Bintang, 2005), 14.) masyarakat di Banjarasri Kalibawang Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Ground Research*, yaitu melakukan pemaparan secara diskriptif, kemudian menginterpretasikan dan menganalisa perilaku berdasarkan temuan di lapangan. Data dilakukan dengan wawancara, observasi dan diskusi. Untuk memperkaya kajian, penulis mencoba mencari buku atau artikel dan data-data dari Kabupaten Kulonprogo yang berhubungan dengan materi tersebut.

Penulis melakukan wawancara,¹⁰ diskusi dan observasi¹¹ untuk memperoleh data yang mendekati obyektif. Metode *Interview* (wawancara) digunakan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat, dan pemerintah dan pemuka agama Banjarasri Kalibawang Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian,¹² adalah pemuka agama, pemerintah dan warga masyarakat di Banjarasri Kalibawang Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta. Obyek penelitian¹³ adalah peran

¹⁰ Metode *Interview* adalah suatu proses tanya jawab secara lisan dimana ada dua atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinganya sendiri. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Kedua* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1983), 136.

¹¹ Metode Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang terjadi. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 126.

¹² Subyek penelitian adalah sumber data yang dipandang sebagai sasaran pengumpulan data. Lihat Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 117.

¹³ Yang dimaksud dengan obyek penelitian adalah data apa saja yang dicari dalam penelitian. *Ibid.*, 117.

agama melalui pemuka agama membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya di Banjarsari Kalibawang Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penulis mengambil data agama-agama di Banjarsari Kalibawang Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta dan menyurvei kegiatan yang dilakukan agama-agama dan masyarakat Banjarsari Kalibawang Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk memproses data tersebut, peneliti menganalisis data tersebut, lalu mendiskripsikannya dan memberikan komentar terhadap permasalahan seputar peran integratif agama-agama dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kalibawang Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menganalisa data tersebut, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi dan psikologi.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami hubungan antara agama dan kehidupan sosial di masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada struktur sosial, konstruksi pengalaman dan budaya termasuk agama. Sehingga sebuah objek, pengetahuan, praktek, institusi merupakan produk dari interaksi dan konstruksi sosial.¹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi dan psikologi untuk mengeksplorasi kondisi masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan.

B. Gambaran Umum Banjarsari Kalibawang Kulonprogo

Kabupaten Kulon Progo, adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ibukotanya adalah Wates. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di timur, Samudra Hindia di selatan, Kabupaten Purworejo di barat, serta Kabupaten Magelang di utara. Nama Kulon Progo berarti sebelah barat Sungai Progo (kata kulon dalam Bahasa Jawa artinya barat). Kali Progo membatasi kabupaten ini di sebelah timur.¹⁵

Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, yang dibagi lagi atas 88 desa dan kelurahan, serta 930 Pedukuhan (sebelum otonomi daerah dinamakan Dusun). Pusat pemerintahan di Kecamatan Wates, yang berada di jalur utama lintas selatan Pulau Jawa (Surabaya - Yogyakarta - Bandung). Wates juga dilintasi jalur kereta api lintas selatan Jawa.

¹⁴ Peter Connolly (ed.), *Approaches to the Study of Religion* (London, New York: Cassell, 1999), 193.

¹⁵ Data ini diambil dari internet: id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kulon_Progo

¹⁶ *Ibid.*

Bagian barat laut wilayah kabupaten ini berupa pegunungan (Bukit Menoreh), dengan puncaknya Gunung Gajah (828 m), di perbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Sedangkan di bagian selatan merupakan dataran rendah yang landai hingga ke pantai. Pantai yang ada di Kabupaten Kulonprogo adalah Pantai Congot, Pantai Glagah dan Pantai Trisik.¹⁶

Daerah yang saat ini termasuk wilayah Kabupaten Kulon Progo sebelumnya terbagi atas dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kabupaten Adikarto yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman. Kedua kabupaten ini akhirnya digabung menjadi Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 Oktober 1951.¹⁷

Sebelum Perang Diponegoro di daerah Negaragung, termasuk di dalamnya wilayah Kulon Progo, belum ada pejabat pemerintahan yang menjabat di daerah sebagai penguasa. Pada waktu itu roda pemerintahan dijalankan oleh pepatih dalem yang berkedudukan di Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah Perang Diponegoro 1825-1830 di wilayah Kulon Progo sekarang yang masuk wilayah Kasultanan terbentuk empat kabupaten yaitu:

- Kabupaten Pengasih, tahun 1831
- Kabupaten Sentolo, tahun 1831
- Kabupaten Nanggulan, tahun 1851
- Kabupaten Kalibawang, tahun 1855

Masing-masing kabupaten tersebut dipimpin oleh seorang tumenggung. Menurut buku *Prodjo Kejawen* pada tahun 1912, Kabupaten Pengasih, Sentolo, Nanggulan dan Kalibawang digabung menjadi satu dan diberi nama Kabupaten Kulon Progo, dengan ibukota di Pengasih. Bupati pertama dijabat oleh Raden Tumenggung Poerbowinoto.¹⁸

Dalam perjalanannya, sejak 16 Februari 1927 Kabupaten Kulon Progo dibagi atas dua kawedanan dengan delapan *kapanewon*, sedangkan ibukotanya dipindahkan ke Sentolo. Dua kawedanan tersebut adalah Kawedanan Pengasih yang meliputi Kapanewon Lendah, Sentolo, Pengasih dan Kokap/Sermo. Kawedanan Nanggulan meliputi Kapanewon Watumurah/Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh.

Berikut adalah daftar Bupati Kulon Progo sampai dengan tahun 1951 adalah sebagai berikut:

¹⁷ Data ini diambil dari internet: id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kulon_Progo

¹⁸ *Ibid.*

1. RT. Poerbowinoto
2. KRT. Notoprajarto
3. KRT. Harjodiningrat
4. KRT. Djojodiningrat
5. KRT. Pringgodingrat
6. KRT. Setjodiningrat
7. KRT. Poerwoningrat¹⁹

Di daerah selatan Kulon Progo ada suatu wilayah yang masuk Keprajan Kejawan yang bernama Karang Kemuning yang selanjutnya dikenal dengan nama Kabupaten Adikarto. Menurut buku *Vorstenlanden* disebutkan bahwa pada tahun 1813, Pangeran Notokusumo diangkat menjadi KGPA Ario Paku Alam I dan mendapat palungguh di sebelah barat Kali Progo sepanjang pantai selatan yang dikenal dengan nama Pasir Urut Sewu. Oleh karena tanah pelungguh itu letaknya berpencaran, maka sentono ndalem Paku Alam yang bernama Kyai Kawirejo I menasehatkan agar tanah pelungguh tersebut disatukan letaknya. Dengan satukannya pelungguh tersebut, maka menjadi satu daerah kesatuan yang setingkat kabupaten. Daerah ini kemudian diberi nama Kabupaten Karang Kemuning dengan ibukota Brosot.²⁰

Sebagai Bupati yang pertama adalah Tumenggung Sosrodidgoyo. Bupati kedua, R. Rio Wasadirdjo, mendapat perintah dari KGPA Paku Alam V agar mengusahakan pengeringan Rawa di Karang Kemuning Rawa-rawa yang dikeringkan itu kemudian dijadikan tanah persawahan yang Adi (Linuwih) dan Karta (Subur) atau daerah yang sangat subur. Oleh karena itu, maka Sri Paduka Paku Alam V lalu berkenan menggantikan nama Karang Kemuning menjadi Adikarta pada tahun 1877 yang beribukota di Bendungan. Kemudian pada tahun 1903 bukotanya dipindahkan ke Wates. Kabupaten Adikarta terdiri dua kawedanan (distrik) yaitu kawedanan Sogan dan kawedanan Galur. Kawedanan Sogan meliputi kapanewon (onder distrik) Wates dan Temon, sedangkan Kawedanan Galur meliputi kapanewon Brosot dan Panjatan.

Bupati di Kabupaten Adikarta sampai dengan tahun 1951 berturut-turut sebagai berikut:

1. Tumenggung Sosrodidgoyo
2. R. Rio Wasadirdjo
3. R.T. Surotani

¹⁹ Data ini diambil dari internet: id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kulon_Progo

²⁰ *Ibid*,

4. R.M.T. Djayengirawan
5. R.M.T. Notosubroto
6. K.R.M.T. Suryaningrat
7. Mr. K.R.T. Brotodiningrat
8. K.R.T. Suryaningrat (Sungkono)

Pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa Kasultanan dan Pakualaman adalah daerah yang bersifat kerajaan dan daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.²¹

Pada tahun 1951, Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII memikirkan perlunya penggabungan antara wilayah Kasultanan yaitu Kabupaten Kulon Progo dengan wilayah Pakualaman yaitu Kabupaten Adikarto. Atas dasar kesepakatan kedua penguasa tersebut, selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 yang ditetapkan tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan tanggal 15 Oktober 1951. Undang-undang ini mengatur tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 untuk Penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu kabupaten dengan nama Kulon Progo yang selanjutnya berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri. Undang-undang tersebut mulai berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1951. Secara yuridis formal Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo adalah 15 Oktober 1951, yaitu saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.²²

Sebagai salah satu desa di Kulon Progo, Desa Banjarsari Kalibawah yang luasnya 1.142.0115 H ini merupakan daerah perbukitan yang sangat indah. Ketinggian tanah dari permukaan laut yaitu: 250-750 M. Adapun batas wilayah Banjarsari adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Banjaroya, Banjarharjo
2. Sebelah Timur : Sungai Progo
3. Sebelah Selatan : Banjararum
4. Sebelah Barat : Sidoharjo, Purwoharjo

Meskipun di daerah perbukitan, masyarakat Banjarsari tidak lepas dari pengaruh agama. Berdasar data monografi tanggal 10 Januari 2011, penduduk

²¹ Data ini diambil dari internet: id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kulon_Progo.

²² *Ibid.*

Banjarasri berjumlah 6.165 orang yang terdiri dari 2.959 orang berjenis kelamin laki-laki dan 3.206 orang perempuan. Dari 6.165 orang tersebut, mereka memeluk agama yang berbeda sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

1. Agama Islam : 1957 orang
2. Agama Kristen : 16 orang
3. Agama Katholik : 4189 orang
4. Agama Budha : 3 orang

Meskipun di daerah perbukitan, masyarakat telah mengikuti pembelajaran mulai dari taman kanak-kanak sampai pendidikan tinggi. Adapun jumlah penduduk menurut lulusan pendidikan umum adalah sebagai berikut:

1. Taman kanak-kanak : 58 orang
2. Sekolah Dasar/ sederajat : 542 orang
3. SLTP/ Sederajat : 299 orang
4. SLTA/ Sederajat : 438 orang
5. Diploma I/II : 30 orang
6. Akademi/ Sarjana Muda/ Diploma III : 48 orang
7. Diploma IV/ Strata I : 49 orang
8. Strata II : 1 orang
9. Strata III : 1 orang

Adapun masyarakat yang lulus pendidikan khusus adalah sebagai berikut.

1. Madrasah : 14 orang
2. Pendidikan Keagamaan : 3 orang
3. Sekolah Luar Biasa : 4 orang
4. Kursus/ Ketrampilan : 7 orang

Dalam bidang pendidikan ini, mempengaruhi ekonomi masyarakat Desa Banjarasri.²³

Secara umum, Penduduk Desa Banjarasri merupakan daerah yang mengalami perkembangan yang bagus. Banyak bangunan megah berdiri di perbukitan. Hal ini tidak lepas dari mata pencaharian yang tersebut di bawah ini.

1. Petani/ Pekebun : 812 orang
2. Mengurus Rumah Tangga : 743 orang
3. Belum/ Tidak Bekerja : 435 orang

²³ Data Monografi Desa Banjarasri

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 4. Pelajar/Mahasiswa | : 314 orang |
| 5. Peternak | : 280 orang |
| 6. Buruh Tani/Perkebunan | : 144 orang |
| 7. Karyawan Swasta | : 121 orang |
| 8. Pensiunan | : 99 orang |
| 9. Tukang Batu | : 85 orang |
| 10. Tukang Kayu | : 70 orang |

Berdasar data di atas, mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Banjarsari adalah petani dan ini mempengaruhi kondisi politik di daerah tersebut.

C. Kondisi Kemiskinan di Kalibawang

Kemiskinan merupakan penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami negara berkembang tetapi juga negara maju. Contoh negara maju adalah Inggris pada tahun 1700-an dan Amerika Serikat pada tahun 1930 dan 1960, 1/6 dr jumlah penduduk miskin yaitu 32 juta. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mempunyai penduduk miskin yang sekitar 1/3 dari penduduk Indonesia.²⁴

Jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin lama semakin berkurang. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin berjumlah 49,5 juta: 7,2 juta di perkotaan dan 15,3 di pedesaan pada tahun 1996. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia) bulan Maret 2008 yang berjumlah 34,96 juta (15,42 persen).²⁵

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia) pada bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2009 berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta. Tanggal 30 Desember 2010, angka kemiskinan turun 1,5 juta:31,03 jiwa Jumlah penduduk Indonesia pada tanggal 7 April 2011 berjumlah 229.964.720 jiwa dengan jumlah penduduk miskin 30-an juta. Penduduk miskin telah tersebar bukan hanya di kota tetapi juga di desa.²⁶

Salah satu desa di Indonesia adalah Kalibawang. Kemiskinan telah menjadi problem di masyarakat yang ditandai dengan membengkaknya jumlah

²⁴ Wikipedia Bahasa Indonesia

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

pengangguran. Menurut data monografi di Kalibawang, ada 435 orang yang belum bekerja dari jumlah penduduk 6.165 orang. Kondisi ini tidak luput dari pengaruh krisis dunia. Menurut Bupati Kulonprogo, H. Toyo Santoso Dipo di Gedung Kaca Pemkab, terjadinya krisis global sedikit banyak telah menimbulkan efek menurunnya kekuatan ekonomi dunia yang berakibat terhadap melemahnya perekonomian di masyarakat. Karena harga barang-barang melonjak dan tidak terjangkau oleh kebanyakan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah, pemuka agama dan masyarakat mengadakan kegiatan untuk mengatasi hal tersebut.²⁷

D. Kegiatan Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak untuk ditangani secara cepat, sistemik, terpadu, dan menyeluruh. Pemerintah telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dimulai sejak tahun 1960-an melalui strategi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yang tertuang dalam Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun (Penasbede). Namun program tersebut terhenti di tengah jalan akibat krisis politik tahun 1965.

Tahun 1970-an pemerintah menggulirkan kembali program penanggulangan kemiskinan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), khususnya Repelita I-IV yang ditempuh secara reguler melalui program sektoral dan regional. Pada Repelita V-VI, pemerintah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dengan strategi khusus menuntaskan masalah kesenjangan sosialekonomi. Jalur pembangunan ditempuh secara khusus dan mensinergikan program reguler sektoral dan regional yang ada dalam koordinasi Inpres Nomor 3 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan yang akhirnya diwujudkan melalui program IDT (Inpres Desa Tertinggal).

Kemudian pemerintah mengeluarkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikoordinasikan melalui Keppres Nomor 190/1998 tentang Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial. Hasilnya, meski sejumlah indikator pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan terasa berlangsung sesuai perencanaan, namun publik menilai program penanggulangan kemiskinan dianggap belum mencapai harapan.

Melihat hasil demikian dan semakin urgennya permasalahan penanggulangan kemiskinan, pada 2001 pemerintah membentuk Komite

²⁷ CNN Indonesia

Penanggulangan Kemiskinan (KPK), melalui Keputusan Presiden Nomor 124/2001. Komite ini berfungsi sebagai forum lintas pelaku dalam melakukan koordinasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan pelaporan seluruh upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk lebih mempertajam KPK, pada September 2005 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sampai ke tingkatan daerah. Pembentukan TKPK Nasional atau TKPKD di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, dimaksudkan guna menjalankan fungsi koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan melakukan langkah-langkah konkrit untuk mengkoordinasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan, Presiden SBY menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (P2K) sekaligus menunjuk Wakil Presiden sebagai ketuanya. Perpres inipun sekaligus menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan perlu diangkat agar koordinasi antara Kementerian dan antar Menko dapat ditingkatkan.

Sesuai amanat dalam Perpres tersebut, dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tim ini memiliki tugas, menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga; serta melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program maupun kegiatan penanggulangan kemiskinan. TNP2K diketuai oleh Wakil Presiden RI, sementara Wakil Ketua I, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Wakil Ketua II adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sekretaris Eksekutif adalah Deputy Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, beranggotakan 12 menteri dan kepala lembaga non-kementerian, serta unsur masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan bidang penanggulangan kemiskinan. Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto menyampaikan bahwa TNP2K dengan struktur yang berada di bawah Wapres Boediono menjadi sangat strategis. "Program-program TNP2K harus jelas dan bisa menyentuh ke level yang paling membutuhkan," jelas Bambang.

Jumlah orang miskin per Maret 2009 tercatat lebih dari 32,53 juta orang atau 14,15 persen. Sementara, 2010 pada periode yang sama, menyebutkan sudah menurun menjadi 31,02 juta orang atau 13,33 persen. Diharapkan, pada 2011 mendatang, jumlah kemiskinan bisa diproyeksikan menurun persentasenya menjadi 11,5-12,5 persen.

Namun, Bambang berharap, tim dapat terus menyempurnakan berbagai program perlindungan sosial agar penduduk yang telah keluar dari kemiskinan tidak jatuh kembali miskin. Sebagaimana pesan Wakil Presiden, Boediono, TNP2K diharapkan akan dapat melakukan sinergitas, hamonisasi dan sinkronisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, sehingga masing-masing kementerian tidak jalan sendiri-sendiri. Dengan demikian dapat dihindari tumpang-tindih kebijakan penanggulangan kemiskinan. Menurut Bambang, prioritas jangka pendek menengah Sekretariat TNP2K selain unifikasi sistem penargetan nasional, adalah menyempurnakan pelaksanaan bantuan sosial kesehatan untuk keluarga miskin, menyempurnakan pelaksanaan dan memperluas cakupan Program Keluarga Harapan (PKH), serta menyempurnakan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Selain itu, untuk mengatasi kemiskinan yang dihadapi masyarakat di Kalibawang, peran agama melalui institusi agama tidak bisa dilepaskan dengan keterlibatan pemerintah dan masyarakat. Keadaan ekonomi di Kalibawang tidak bisa dilepaskan dari mata pencaharian masyarakat. Data monografi Desa Banjarsari Kalibawang menunjukkan bahwa masyarakat mayoritas berprofesi sebagai petani. Mereka sangat menggantungkan pada lahan pertanian sebagai tempat bekerja. Di samping itu, ada sebagian masyarakat yang hanya mengurus rumah tangga, belum/tidak bekerja, pelajar/mahasiswa, peternak, buruh tani/perkebunan, karyawan swasta, pensiunan, tukang batu, tukang kayu dan sebagainya. Dari data ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat di Banjarsari masih banyak yang hidup di garis kemiskinan.

Garis kemiskinan adalah ukuran rata-rata kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan minimum. Indikator ekonomi menggunakan tiga pendekatan: produksi, pendapatan dan pengeluaran. Biro Pusat Statistik (BPS) untuk menarik garis kemiskinan adalah pendekatan pengeluaran. Di Indonesia, garis kemiskinan pada tahun 1998 berjumlah Rp. 96.959,00 di kota dan Rp. 72.780,00 di desa. Garis kemiskinan pada tahun 2007 berjumlah Rp. 187.942,00 di kota dan Rp. 146.837,00 di desa. Di Yogyakarta, garis kemiskinan pada tahun 2007 berjumlah Rp. 200.855,00 di kota dan Rp. 156.349,00 di desa.

Sebagai contoh, penduduk yang masih di bawah garis kemiskinan ada. Sebagai contoh, seorang pedagang jamu yang berdagang di pasar Boro. Setiap hari, ia mendapatkan rata-rata keuntungannya 5 ribu perhari. Jika dihitung, dia perbulan mendapatkan gaji Rp. 150.000,00 perbulan. Menurut seorang ibu di Banjarasri, kehidupan masyarakat banyak yang masih di bawah garis kemiskinan. Penghasilannya tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari.

Ada salah satu petani mengerjakan sawah milik seseorang. Dia bisa memanen 10 bagor gabah atau jika dikeringkan menjadi 5 bagor. Dia hanya mendapatkan setengahnya yaitu 3 bagor beras atau sekitar Rp. 500.000,00. Ini belum dipotong oleh biaya untuk menanam padi dan pupuk yang mencapai Rp 100.000.00. Jadi penghasilan bersihnya yaitu Rp. 400.000,00 per panen. Jika dihitung, maka perbulan dia mendapatkan uang sekitar Rp.134.000,00.

Berdasar data-data di atas, masyarakat masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk membantu para petani, agama juga ikut terlibat, seperti diadakannya penggilingan padi. Penggilingan padi ini merupakan usaha yang dilakukan oleh Gereja untuk membantu masyarakat. Di samping penggilingan padi, ada koperasi tenun yang didirikan oleh orang Kristen di Boro. Koperasi tenun ini adalah usaha yang dilakukan oleh pihak Gereja. Para pekerja yang ikut di koperasi ini tidak hanya dari kalangan Kristen saja, tetapi juga menampung dari berbagai agama.

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat dapat bekerjasama dengan yang lain meskipun berbeda agama. Ini menunjukkan bahwa masyarakat telah yang berbasis toleransi untuk kemajuan desa. Pemerintah Desa dengan masyarakat mendirikan Lembaga Keuangan Mikro dan Pemancingan. Lembaga Keuangan ini merupakan sebuah lembaga yang membantu masyarakat dalam hal keuangan. Masyarakat baik yang beragama Islam maupun non Islam ikut bagian di lembaga tersebut.

Di samping itu, pemerintah bersama dengan masyarakat mengadakan Desa Wisata. Kegiatan ini juga diperkuat oleh keterlibatan Umat Islam dan umat yang lain dalam kegiatan tersebut. Sehingga, Desa Wisata ini merupakan suatu usaha yang dapat menyatukan semua warga masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan tersebut.

Dengan Desa Wisata tersebut, pemerintah dan masyarakat dapat menambah penghasilan. Sebagai contoh, tenun sebagai salah satu daya pikat dari desa wisata tersebut bisa diminati bukan hanya penduduk lokal tetapi juga dari luar daerah yang datang ke lokasi tersebut. Pedagang laku dagangannya disekitar lokasi tersebut.

Untuk mendukung Desa Wisata tersebut, Pemerintah Desa bersama masyarakat menyediakan odong-odong sebagai alat untuk membantu para wisatawan mengelilingi desa. Hal ini akan mempengaruhi pendapatan warga masyarakat dan dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat.

Berdasar data monografi, penduduk Banjarasri sangat beragam. Ada yang ada dalam kehidupan yang mapan dan ada juga yang masih dalam kategori di bawah garis kemiskinan. Sampai tahun 2011 ini, kehidupan sosial masyarakat Banjarasri mengalami perkembangan. Banyak warga yang peduli dengan kondisi masyarakat sekitar. Hal ini mempengaruhi psikologi masyarakat di Banjarasri. Ada beberapa kegiatan sosial yang muncul, seperti: Karang Taruna dan Panti Asuhan. Menurut data Monografi desa Banjarasri, ada 18 buah Karang Taruna dengan 468 anggota. Panti asuhan berjumlah 2 buah dengan 155 anggota.

Dalam bidang sosial ini, selain pemerintah, agama melalui institusinya juga terlibat untuk mengatasi masalah sosial tersebut. Panti werdha ini adalah salah satu usaha yang didirikan oleh Umat Kristen untuk menampung warga yang membutuhkan. Dari data yang ada, warga yang tinggal di panti ini tidak hanya yang beragama kristen, tetapi juga agama lain. Panti asuhan ini adalah juga merupakan salah satu usaha yang didirikan oleh orang Kristen. Warga yang tinggal di panti ini juga tidak hanya yang beragama kristen, tetapi juga agama lain.

Menurut bapak kepala desa Banjarasri, warga masyarakat saling membantu dalam berbagai hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Sebagai contoh, dalam acara gotong royong, warga masyarakat bahu membahu untuk membuat makam. Ketika ada sebuah gereja rusak, seluruh warga masyarakat ikut gotong- royong untuk memperbaiki gereja tersebut, meskipun mereka ada yang beragama Islam. Menurut bapak Kepala Desa, Pemerintah Desa dengan masyarakat mengadakan Pesta Tumpeng tgl 30 Oktober 2011 untuk syukuran desa. Warga masyarakat ikut menyemarakkan acara tersebut tanpa membedakan agama masing-masing.

Semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang masih kental di Banjarasri tersebut merupakan suatu kekuatan untuk melawan kemiskinan. Selain kepedulian sosial dan gotong royong, dua prinsip lain yang juga ditekankan adalah kedisiplinan dan kemandirian.

Dalam gerakan ini, masyarakat dalam basis lingkup RW mengidentifikasi dan memecahkan masalah kemiskinan di wilayahnya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Bukan hanya kemiskinan yang berakar dari masalah

struktural, seperti kesempatan kerja dan minimnya pendidikan, tetapi juga dari akar budaya ataupun nilai, seperti kemalasan.²⁸

Karena itu, setiap warga diwajibkan memberi andilnya dalam gerakan tersebut.”Misalnya, warga yang memiliki usaha mempekerjakan tetangga miskin di lingkungan RW-nya. Kalau yang berprofesi guru atau pendidik, mendidik keterampilan bagi warga penganggur. Kalau yang menjadi ulama, memberikan petuah keagamaan untuk bangkit dari kemiskinan,” kata Herry Zudianto.

Berdasar hal tersebut, kondisi masyarakat sudah mengalami kemajuan dalam hal toleransi beragama dalam bidang sosial yang tidak bisa dilepaskan dengan bidang lain, khususnya dalam bidang pendidikan.

Dalam bidang pendidikan, warga masyarakat telah mengenyam pendidikan dari mulai Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi. Dari data monografi desa, masyarakat yang lulusan SD dan SMA menduduki peringkat teratas. Hal ini menjadi salah satu hasil dari usaha yang dilakukan sampai sekarang yang didukung oleh sarana prasarana yang ada.

Di Banjarasri, ada beberapa sekolah baik negeri maupun swasta. Sekolah Negeri tersebut adalah Sekolah Dasar/ sederajat yang jumlahnya 2. Sekolah swasta yaitu Taman kanak-kanak berjumlah 3, SD/ sederajat ada 5 dan SLTP/ sederajat ada 2 buah.

Berdasar data tersebut diatas, keterlibatan pihak swasta dalam pendidikan di Desa Banjarasri lebih besar. Sekolah swasta ini merupakan sumbangan dari agama melalui gereja dalam bidang pendidikan, seperti: Yayasan Marsudiri dan Yayasan Pangudi Luhur Ranting Boro.

Berdasar data diatas, agama telah menyumbang berbagai lembaga dalam bidang pendidikan. Dari bidang pendidikan ini, masyarakat diharapkan mapu menjadi pribadi yang cerdas. Selain dalam bidang pendidikan, agama dengan institusinya juga mempunyai andil dalam kemajuan khususnya dalam bidang keagamaan.

Dalam bidang keagamaan, umat beragama secara psikologis telah membentuk berbagai lembaga yang dapat meningkatkan ketakwaan dan persahabatan dalam agama maupun antar agama. Di Banjarasri, ada beberapa lembaga seperti: Majelis Ta’lim 8 kelompok yang mempunyai anggota 436 orang, Majelis Gereja 1 kelompok, Remaja Masjid 8 kelompok dengan anggota 187 orang dan Remaja Gereja 1 kelompok dengan anggota 142 orang.

²⁸ Lihat artikel “Penanggulangan Kemiskinan” di *Kompas.com*.

²⁹ Data Monografi Desa Banjarasri 2009

Kegiatan tersebut tidak terlaksana dengan baik tanpa adanya sarana dan prasarana yang ada. Di Banjarasri, ada 8 masjid, musholla 8 buah dan 8 gereja. Meskipun jumlah tempat ibadah Umat Islam dua kali lipat Umat Kristen, tapi jumlah Umat Kristen tiga kali lebih besar daripada Umat Islam.

Meskipun berbeda agama, masyarakat beserta aparat pemerintah saling mendukung untuk mengatasi persoalan yang dihadapi desa, khususnya masalah kemiskinan. Sehingga, masyarakat yang sejahtera akan terwujud.

Secara politik, masyarakat Desa Banjarasri telah mengalami dinamika perpolitikan yang demokratis. Hal ini bisa dilihat pada Pemilihan Umum tahun 2009. Masyarakat telah melakukan pencoblosan dan hasilnya merata di setiap Partai Politik.

Dalam pemilihan tersebut, ada 5 partai yang mendapat dukungan terbanyak diantara partai yang lain yaitu:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 932 orang
2. Partai Golongan Karya : 518 orang
3. Partai Amanah Nasional : 474 orang
4. Partai Karya Peduli Bangsa : 115 orang
5. Partai Demokrat : 111 orang²⁹

Dari data tersebut, ada tiga partai yang mendapat dukungan terbanyak, yaitu: PDIP, Partai Golkar dan PAN. Meskipun demikian, partai-partai yang lain juga mendapatkan dukungan dari masyarakat. Mereka menggunakan hak suara dengan bebas, tertib dan aman terkendali. Kondisi yang demikian dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang damai sejahtera baik fisik maupun psikologis.

E. Penutup

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Ditinjau dari perspektif sosiologi dan psikologi, problem kemiskinan yang dihadapi masyarakat Banjarasri Kalibawang Kulonprogo adalah masalah ekonomi.
2. Melalui para pengikutnya, Agama-agama dengan institusinya mempunyai peran untuk mengatasi kemiskinan di Banjarasri dalam berbagai bidang, yaitu: dalam bidang ekonomi, dengan mendirikan Penggilingan Padi, Lembaga Keuangan Mikro, Pemancingan Desa wisata dan Odong-

odong, bidang sosial dengan mendirikan Panti Asuhan, Panti Werdha, Pesta Tumpeng dan melakukan gotong royong; bidang pendidikan dengan mendirikan Sekolah/yayasan; bidang keagamaan dengan mendirikan Majelis Ta'lim dan Majelis Gereja

Referensi

- an-Na'im, Abdullahi. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and international Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Darajat, Zakiyah. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 2005.
- Gans, Herbert J. "Kebudayaan dan Kelas Dalam Studi Mengenai Kemiskinan: Sebuah Pendekatan Terhadap Penelitian Anti Kemiskinan." Dalam Parsudi Suparlan (peny.). *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Kedua*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1983.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: Rosda Karya, 2001.
- Lewis, Oscar. "Kebudayaan Kemiskinan". Dalam Parsudi Suparlan (peny.) *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Madjid, Nurcholis. "Beberapa Renungan Tentang Kehidupan Keagamaan di Indonesia Untuk Generasi Mendatang", *Makalah di TIM*, 21 Oktober 1992.
- Magnis-Suseno, Franz. "Pluralisme Agama, Dialog dan Konflik di Indonesia", dalam Th. Sumartana, dkk., *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei, 2001.
- Mediacenter. "58 Pemuka Agama Panjatkan Doa Untuk Kemakmuran Kulon Progo", Selasa, 13/10/2009 09:16 WIB, e-mail: admin@kulonprogokab.go.id.
- Merton, Robert K. *Social Theory and Social Structure*. Glencoe: The Free Press, 1949.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Nottingham, Elizabeth K. *Agama dan Masyarakat*. Diterjemahkan oleh Abdul Muis Naharong. Jakarta: Rajawali Press, 1992.

- O'Dea, Thomas F. *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Smith, Huston. *Agama-agama Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Suaedy, Ahmad. "Agama, Spiritualitas Baru dan Keadilan Perspektif Islam."
 Dalam Mangunwijoyo, YB, dkk. *Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat*. Yogyakarta: Penerbit Institut Dian/Intefidei, 1994.
- Sudjatmoko. *Etika Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1984.
- Sumartana, Th. "Dari Konfrontasi ke Dialog: Beberapa Aspek Landasan Historis-Teologis Hubungan Antar-Etnis dan Agama di Indonesia."
 Dalam Sumartana, Th. dkk. *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei, 2001.
- Suparlan Parsudi (peny.). *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Wach, Joachim. *Sociology of Religion*. Chicago: The Chicago University Press, 1971.

***Dian Nur Anna, S.Ag., M.A.** adalah Dosen Tetap Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. E-mail: diannuranna_76@yahoo.com